Nusantara Hasana Journal
Volume 4 No. 11 (April 2025), Page: 54-60
E-ISSN : 2798-1428

TUGAS POKOK DAN FUNGSI OPERATOR SEKOLAH DI UPT SPF SMP NEGERI 3 MAKASSAR

Main Duties And Functions Of School Operators At UPT SPF SMP Negeri 3 Makassar

Dira Tri Andini[1], Wahira[2], Sumarlin Mus[3]

[1,2,3]Universitas Negeri Makassar

Email: diratriandini583@gmail.com

Abstract
This study aims to describe and analyze the implementation of the main duties and functions of school operators at UPT SPF SMP Negeri 3 Makassar, as well as to identify the supporting and inhibiting factors in their execution. School operators play a vital role in managing digital-based educational data, especially through the Dapodik application. However, they often face excessive workloads, lack of structural support, and limited training opportunities. This research employs a descriptive qualitative approach, utilizing observation, interviews, and documentation as data collection techniques. The findings reveal that school operators hold a strategic position in supporting digital education governance, yet they do not receive structural recognition proportional to their responsibilities. There is a pressing need for policy reformulation and the development of clear standard operating procedures (SOPs) to strengthen their role and improve the professionalism of school operators. These findings contribute significantly to the development of data-driven education policies and the reinforcement of a more inclusive school administrative system.
Keywords: *job description, operator*

Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis pelaksanaan tugas pokok dan fungsi operator sekolah di UPT SPF SMP Negeri 3 Makassar, serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaannya. Operator sekolah memegang peranan penting dalam pengelolaan data pendidikan berbasis digital, khususnya melalui aplikasi Dapodik. Akan tetapi, operator sekolah sering kali menghadapi beban kerja yang berlebihan, kurangnya dukungan struktural, dan terbatasnya kesempatan pelatihan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa operator sekolah memiliki posisi strategis dalam mendukung tata kelola pendidikan digital, namun belum mendapatkan pengakuan struktural yang sepadan dengan tanggung jawabnya. Reformulasi kebijakan dan penyusunan prosedur operasi standar (SOP) yang jelas sangat diperlukan untuk memperkuat peran dan meningkatkan profesionalisme operator sekolah. Hasil penelitian ini memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pengembangan kebijakan pendidikan berbasis data dan penguatan sistem administrasi sekolah yang lebih inklusif.
Kata Kunci*: Tupoksi, operator*

PENDAHULUAN

Perkembangan sistem administrasi pendidikan di Indonesia semakin menuntut

Nusantara Hasana Journal
Volume 4 No. 11 (April 2025), Page: 54-60
E-ISSN : 2798-1428

optimalisasi peran tenaga kependidikan, termasuk operator sekolah, sebagai pilar penting dalam pengelolaan data pendidikan. Operator sekolah memiliki tanggung jawab vital dalam memastikan keakuratan data siswa, guru, sarana, hingga pembiayaan melalui aplikasi Dapodik, yang menjadi basis kebijakan pemerintah dalam sektor pendidikan dasar dan menengah (Ngongira & Iriani, 2020). Namun, pada praktiknya, mereka kerap menghadapi beban kerja berlebih, ketidakpastian wewenang struktural, serta dukungan infrastruktur yang belum memadai (Isbianti et al., 2021). Realitas ini semakin kompleks dengan masih rendahnya pemahaman sebagian pemangku kebijakan terhadap peran strategis operator sekolah dalam menunjang mutu layanan pendidikan di satuan pendidikan dasar.

Literatur menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi administrasi pendidikan sangat tergantung pada efektivitas manajemen dan keterlibatan tenaga kependidikan, khususnya operator sekolah sebagai pelaksana teknis administrasi berbasis teknologi (Triatna, 2015). Sayangnya, sebagian besar penelitian masih lebih menyoroti kepala sekolah atau guru sebagai subjek utama tata kelola pendidikan, sementara peran operator sekolah masih kurang diperhatikan dalam kerangka teoritis maupun kebijakan pendidikan (Fathul, 2018). Ini menimbulkan kesenjangan literatur terkait analisis mendalam mengenai tugas pokok dan fungsi operator sekolah dalam mendukung kebijakan berbasis data. Oleh sebab itu, perlu kajian khusus yang menempatkan operator sebagai objek utama guna menjawab kekosongan teoritis dan praktik yang ada di lapangan.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis pelaksanaan tugas pokok dan fungsi operator sekolah di UPT SPF SMP Negeri 3 Makassar. Selain itu, penelitian ini juga dimaksudkan untuk mengidentifikasi faktor-faktor pendukung serta hambatan dalam pelaksanaan tugas operator sekolah agar dapat memberikan rekomendasi peningkatan profesionalisme tenaga kependidikan. Tujuan ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas tentang peran strategis operator sekolah dalam menyukseskan program digitalisasi data pendidikan di lingkungan sekolah menengah pertama.

Urgensi penelitian ini didasarkan pada kenyataan bahwa digitalisasi administrasi pendidikan memerlukan tenaga profesional yang terampil dan didukung oleh sistem yang adaptif dan inklusif (Mening, 2024). Operator sekolah memainkan peran strategis dalam proses tersebut, namun masih belum mendapatkan pengakuan struktural dan kompensasi yang setara dengan beban kerjanya (Rahmat et al., 2021). Berdasarkan tujuan penelitian yang telah dirumuskan, maka penelitian ini penting untuk dilakukan guna mengadvokasi posisi operator dalam sistem pendidikan dan memberi masukan kebijakan berbasis temuan empiris. Melalui kajian ini, diharapkan muncul pemahaman komprehensif yang dapat memperbaiki sistem dukungan terhadap tenaga operator di sekolah.

METODE

Fenomena yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah pelaksanaan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) operator sekolah di UPT SPF SMP Negeri 3 Makassar, yang mencerminkan peran strategis operator dalam mendukung kelancaran administrasi pendidikan berbasis teknologi informasi. Permasalahan yang dijumpai di lapangan adalah ketidakseimbangan antara beban kerja operator dengan pengakuan struktural terhadap posisi mereka, keterbatasan fasilitas pendukung, dan hambatan teknis dalam pengelolaan data Dapodik, serta kurangnya dukungan kebijakan yang memadai. Hal ini mengindikasikan perlunya kajian yang lebih mendalam untuk memahami sejauh mana operator menjalankan tupoksi-nya dalam praktik serta tantangan yang mereka hadapi di sekolah menengah negeri. Fenomena tersebut mencerminkan adanya kesenjangan antara peran ideal yang diharapkan dan pelaksanaan riil di lapangan (Calista & Rakhmalina, 2020).

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian

Nusantara Hasana Journal
Volume 4 No. 11 (April 2025), Page: 54-60
E-ISSN : 2798-1428

deskriptif, karena bertujuan untuk mendeskripsikan secara rinci dan mendalam tentang pelaksanaan tugas operator sekolah serta faktor-faktor yang memengaruhinya. Pendekatan ini dipilih untuk memahami fenomena sosial secara holistik dan kontekstual melalui perspektif subjek penelitian itu sendiri. Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini meliputi data primer dan sekunder. Data primer diperoleh secara langsung melalui interaksi dengan subjek penelitian melalui wawancara dan observasi, sedangkan data sekunder berupa dokumen sekolah, foto kegiatan, serta arsip administrasi sekolah sebagai pelengkap dan penguat data primer yang telah dikumpulkan (Ningsi et al., 2022).

Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer diperoleh dari wawancara mendalam dengan kepala sekolah, operator sekolah, tenaga administrasi (TU), wakil kepala sekolah bidang sarana prasarana, serta guru sebagai informan kunci yang memahami langsung peran dan tantangan operator sekolah. Sementara itu, sumber data sekunder berasal dari dokumen internal sekolah seperti cetakan data Dapodik, catatan pelaporan PIP, dokumen inventarisasi sarana dan prasarana, serta arsip digital yang merekam aktivitas administratif yang dijalankan oleh operator sekolah. Penggunaan berbagai sumber data ini dimaksudkan untuk mendapatkan perspektif yang komprehensif dan memperkuat validitas data yang diperoleh di lapangan (Rahmat et al., 2021).

Proses pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik utama, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan secara langsung di lingkungan UPT SPF SMP Negeri 3 Makassar untuk mengamati aktivitas kerja operator sekolah dan interaksi antar pemangku kepentingan di sekolah. Wawancara mendalam dilakukan secara semi-terstruktur agar peneliti dapat menggali informasi secara fleksibel namun tetap fokus pada permasalahan yang telah ditentukan. Sedangkan dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data pelengkap yang bersifat administratif dan visual, seperti berkas data siswa, laporan bantuan operasional, dan bukti pelaksanaan tugas operator. Setiap tahapan ini dilakukan secara sistematis mulai dari pra-lapangan, kerja lapangan, hingga pengolahan data, agar proses pengumpulan data berjalan sesuai dengan prinsip validitas dan keabsahan dalam penelitian kualitatif (Asmoro & Resmiatini, 2020).

Teknik analisis data dalam penelitian ini merujuk pada model interaktif yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman yang mencakup tiga tahapan utama: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan cara memilah, menyederhanakan, serta mengorganisasi hasil wawancara dan observasi berdasarkan tema atau kategori tertentu. Penyajian data dilakukan dengan membuat matriks, bagan, atau narasi tematik yang memudahkan peneliti melihat keterkaitan antar elemen data. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi yang dilakukan secara berulang untuk memastikan bahwa hasil temuan benar-benar mencerminkan realitas di lapangan. Seluruh tahapan analisis ini dilakukan secara siklis dan tidak linear, sehingga memungkinkan adanya fleksibilitas dan kedalaman dalam interpretasi data (Fadillah & Riyanto, 2020).

HASIL

Data hasil observasi dan wawancara menunjukkan bahwa operator sekolah di UPT SPF SMP Negeri 3 Makassar melaksanakan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) yang sangat kompleks dan mencakup berbagai aspek administratif, seperti penginputan data peserta didik, pendidik, sarana prasarana, dan keuangan melalui aplikasi Dapodik. Selain itu, operator juga bertanggung jawab atas pengelolaan data Program Indonesia Pintar (PIP) serta pelaporan data secara berkala ke Dinas Pendidikan Kota Makassar. Keseluruhan aktivitas tersebut menunjukkan bahwa tupoksi operator tidak terbatas pada pekerjaan teknis, tetapi juga memuat unsur strategis dalam mendukung tata kelola pendidikan yang berbasis data aktual dan akurat (Ningsi et al., 2022).

Hasil wawancara dengan kepala sekolah dan operator mengungkapkan bahwa

Nusantara Hasana Journal
Volume 4 No. 11 (April 2025), Page: 54-60
E-ISSN : 2798-1428

dalam pelaksanaan tupoksi, operator sekolah menjalankan sembilan peran utama yang meliputi verifikasi data, sinkronisasi berkala, validasi data peserta didik, pengelolaan BOS, dan pendataan aset. Namun demikian, terdapat ketidaksesuaian antara beban kerja dan jumlah sumber daya yang tersedia, di mana seorang operator harus menangani semua jenis data tanpa dukungan asisten atau pembagian tugas yang jelas. Hal ini diperparah oleh keterbatasan waktu dan ketergantungan pada input data dari guru dan wali kelas yang sering kali tidak tepat waktu (Asmoro & Resmiatini, 2020).

Temuan ini memperkuat bahwa realitas pelaksanaan tupoksi operator sekolah masih menghadapi kendala struktural dan operasional yang signifikan. Ketimpangan antara ekspektasi lembaga terhadap performa operator dan fasilitas pendukung yang minim mencerminkan adanya kesenjangan kebijakan internal dalam pemberdayaan tenaga kependidikan non-guru. Beban kerja yang tinggi, tidak adanya struktur organisasi yang mengakomodasi pembagian kerja operator, serta kurangnya apresiasi terhadap tugas strategis mereka memperjelas akar permasalahan yang menjadi latar belakang dilakukannya penelitian ini.

Peran operator sekolah dalam mendukung keberlangsungan sistem informasi pendidikan di UPT SPF SMP Negeri 3 Makassar terlihat dari intensitas keterlibatannya dalam proses pendataan, validasi, serta pelaporan ke instansi pendidikan terkait. Operator tidak hanya bekerja di balik layar dalam hal input data, tetapi juga menjadi penghubung antara sekolah dan Dinas Pendidikan terkait implementasi kebijakan berbasis data. Bahkan dalam beberapa kasus, operator juga terlibat dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan serta perencanaan kebutuhan sarana prasarana pendidikan (Rahmat et al., 2021).

Wawancara dengan tenaga administrasi dan guru mengindikasikan bahwa operator sekolah memegang peranan krusial dalam menjamin ketepatan alokasi bantuan pendidikan dan BOS. Mereka juga berperan dalam mengatasi kendala teknis seperti kesalahan sinkronisasi Dapodik serta memperbaiki data peserta didik yang bermasalah secara administratif. Akan tetapi, tidak terdapat sistem monitoring kinerja operator secara formal, dan pelatihan peningkatan kompetensi juga masih sangat terbatas. Ketiadaan SOP yang spesifik juga menyebabkan banyak tugas operator ditentukan berdasarkan inisiatif pribadi, bukan sistem manajemen sekolah yang terstruktur (Fadillah & Riyanto, 2020).

Kondisi ini menggambarkan ketidakterpenuhinya kebutuhan dasar tenaga kependidikan dalam aspek pelatihan, pengakuan struktural, dan pembagian kerja yang adil. Masalah yang dihadapi oleh operator sekolah bukan hanya terletak pada aspek teknis semata, melainkan juga struktural dan manajerial. Hal ini selaras dengan rumusan masalah dalam penelitian, yaitu kurangnya pemahaman dan penguatan terhadap fungsi strategis operator sekolah dalam sistem administrasi pendidikan berbasis digital.

Administrasi sekolah di UPT SPF SMP Negeri 3 Makassar secara umum sudah terdigitalisasi melalui penerapan aplikasi Dapodik, namun masih terdapat permasalahan dalam integrasi antar unit kerja. Operator sekolah menjadi ujung tombak dalam proses pelaporan administrasi seperti data siswa, guru, keuangan, dan aset, yang semuanya dibutuhkan untuk pelaporan ke Dinas Pendidikan. Fungsi administrasi yang idealnya dikelola secara kolektif oleh tim administrasi sekolah, dalam praktiknya lebih banyak dibebankan pada operator sekolah sebagai pelaksana tunggal proses digitalisasi data pendidikan (Lestari & Ridwan, 2014).

Berdasarkan observasi dokumen dan wawancara, ditemukan bahwa administrasi sekolah melibatkan berbagai sistem pelaporan seperti e-RKAS, Dapodik, dan SIPLah yang semuanya dikelola oleh operator sekolah tanpa ada tim teknis pendukung. Ketergantungan ini berisiko menimbulkan stagnasi ketika operator berhalangan hadir atau menghadapi kendala teknis. Selain itu, tidak adanya pelimpahan tugas saat operator tidak berada di tempat juga menunjukkan lemahnya sistem backup administrasi sekolah. Akibatnya, proses manajemen data menjadi terhambat dan memengaruhi kinerja sekolah

Nusantara Hasana Journal
Volume 4 No. 11 (April 2025), Page: 54-60
E-ISSN : 2798-1428

dalam menyampaikan laporan secara tepat waktu (Yulisman, 2016).

Temuan ini semakin mempertegas bahwa permasalahan administrasi sekolah yang dibebankan pada operator secara berlebihan merupakan bentuk ketidakefektifan sistem manajerial di sekolah. Kesenjangan antara tugas formal yang tercantum dalam deskripsi kerja dan kenyataan lapangan menjadi bagian penting dari persoalan struktural yang perlu dipecahkan. Realitas ini selaras dengan fokus utama penelitian, yaitu perlunya pemetaan ulang dan restrukturisasi tugas operator sekolah dalam kerangka administrasi pendidikan digital yang sehat dan berkelanjutan.

PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran operator sekolah telah berkembang melampaui tugas administratif semata dan bertransformasi menjadi posisi strategis dalam mendukung digitalisasi manajemen pendidikan. Kendati demikian, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai hambatan seperti beban kerja tidak proporsional, minimnya dukungan struktural, serta keterbatasan pelatihan. Ketimpangan antara beban tanggung jawab dan pengakuan institusional mencerminkan adanya disfungsi manajerial dalam mengelola sumber daya manusia di satuan pendidikan, terutama dalam hal tenaga kependidikan non-guru. Situasi ini menunjukkan bahwa belum ada keselarasan antara sistem tata kelola sekolah berbasis data dan struktur kelembagaan yang adaptif terhadap tuntutan digitalisasi pendidikan (Fadillah & Riyanto, 2020).

Berbeda dari penelitian-penelitian sebelumnya yang lebih banyak menyoroti peran kepala sekolah atau guru dalam manajemen satuan pendidikan, penelitian ini menempatkan operator sekolah sebagai subjek utama dalam kajian tata kelola pendidikan digital. Penelitian lain seperti oleh (Isbianti et al., 2021) hanya membahas pendampingan administrasi tanpa menguraikan kompleksitas fungsi operator secara struktural. Dengan demikian, keunggulan penelitian ini terletak pada pemetaan holistik terhadap tupoksi operator serta identifikasi mendalam atas faktor internal dan eksternal yang memengaruhi kinerjanya. Ini menjadikan penelitian ini sebagai kontribusi penting dalam memperluas cakupan studi manajemen pendidikan dengan fokus pada aktor teknis yang selama ini terabaikan.

Hasil penelitian merefleksikan bahwa pemahaman mendalam terhadap pelaksanaan tupoksi operator sekolah tidak hanya penting untuk menilai efektivitas administrasi, tetapi juga untuk memperkuat landasan kebijakan pendidikan digital. Pemaparan tugas operator yang kompleks dan strategis menjadi bukti bahwa kebijakan pendidikan tidak boleh lagi mengabaikan aktor-aktor teknis dalam sistem sekolah. Oleh karena itu, penelitian ini memberikan kontribusi tidak hanya dalam aspek ilmiah, tetapi juga praktis untuk reformasi sistem manajemen sumber daya manusia di sekolah.

Secara implikatif, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai dasar pengambilan kebijakan di tingkat sekolah dan dinas pendidikan untuk menyusun deskripsi kerja yang lebih realistis, menyediakan pelatihan teknis berkala, serta menyusun mekanisme pengakuan struktural bagi operator sekolah. Penemuan ini juga dapat mendorong evaluasi ulang terhadap struktur organisasi sekolah agar lebih responsif terhadap perubahan sistem administrasi berbasis teknologi. Selain itu, hasil ini penting bagi pengembang kebijakan digitalisasi pendidikan agar tidak semata fokus pada platform teknologi, tetapi juga kesiapan sumber daya manusia di tingkat implementasi (Rahmat et al., 2021).

Hasil penelitian yang menunjukkan tumpang tindih peran dan beban kerja operator sekolah terjadi karena belum adanya regulasi operasional yang jelas tentang pembagian kerja administratif di sekolah. Selain itu, kultur organisasi yang masih menganggap tugas administrasi sebagai pelengkap pendidikan turut menjadi penghambat dalam memperkuat posisi operator sebagai aktor kunci dalam tata kelola sekolah. Ketiadaan supervisi dan pelatihan juga menyebabkan kemampuan operator berkembang secara otodidak, yang tidak menjamin konsistensi kualitas kerja antar satuan pendidikan

Nusantara Hasana Journal
Volume 4 No. 11 (April 2025), Page: 54-60
E-ISSN : 2798-1428

(Calista & Rakhmalina, 2020).

Berdasarkan hasil penelitian, penting untuk segera melakukan reformulasi kebijakan tugas dan fungsi tenaga kependidikan non-guru, khususnya operator sekolah, dengan menyusun standar operasional prosedur (SOP) yang baku dan sistem pengukuran kinerja yang terstruktur. Pemerintah daerah juga harus menyediakan platform pelatihan terpadu bagi operator sekolah untuk memperkuat kapasitas teknis dan administratif mereka. Di tingkat sekolah, pembentukan tim teknis administrasi digital dapat menjadi langkah konkret untuk meringankan beban kerja dan memastikan kontinuitas layanan administrasi meskipun terjadi rotasi atau ketidakhadiran operator utama (Ningsi et al., 2022).

KESIMPULAN

Salah satu temuan yang paling mengejutkan dari penelitian ini adalah kenyataan bahwa operator sekolah, yang selama ini dianggap sebagai tenaga pelengkap dalam administrasi pendidikan, justru memegang peran sentral dalam menjaga keberlangsungan sistem informasi pendidikan berbasis digital. Mereka tidak hanya mengelola data teknis, tetapi juga menjadi penentu validitas berbagai kebijakan pendidikan yang berbasis pada sistem Dapodik. Ironisnya, beban kerja yang kompleks ini tidak diimbangi dengan dukungan struktural, pelatihan berkelanjutan, maupun sistem pembagian kerja yang memadai. Temuan ini memperlihatkan adanya paradoks di lingkungan pendidikan: sistem yang menuntut akurasi dan efisiensi tinggi, namun belum memberikan tempat yang layak bagi aktor penting di balik keberhasilannya.

Penelitian ini memberikan sumbangan penting terhadap pengembangan keilmuan, baik secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis, penelitian ini memperluas cakupan studi administrasi pendidikan dengan memasukkan peran operator sekolah sebagai subjek sentral dalam analisis sistem manajemen pendidikan digital. Sementara secara praktis, hasil penelitian ini membuka ruang untuk perumusan kebijakan yang lebih adil dan strategis terhadap tenaga kependidikan non-guru, khususnya dalam konteks digitalisasi data sekolah. Kajian ini juga dapat menjadi referensi implementatif bagi pengambil kebijakan, kepala sekolah, hingga pengembang sistem informasi pendidikan dalam merancang tata kelola administrasi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Meskipun penelitian ini telah menggali peran operator sekolah secara mendalam, fokusnya yang terbatas pada satu satuan pendidikan menjadi ruang yang potensial untuk pengembangan penelitian lanjutan. Keterbatasan ini bukan merupakan kelemahan, melainkan titik awal untuk memperluas kajian ke berbagai konteks sekolah, baik secara geografis maupun jenjang pendidikan yang berbeda. Selain itu, penelitian lanjutan dapat memperkaya pendekatan dengan menggunakan kombinasi metode kuantitatif untuk memetakan persepsi dan kepuasan kerja operator sekolah secara lebih luas. Dengan demikian, pengembangan ini diharapkan mampu menghasilkan rekomendasi kebijakan yang lebih komprehensif dan berbasis bukti lintas konteks.

DAFTAR PUSTAKA

Asmoro, H., & Resmiatini, D. (2020). Penguatan tugas pokok dan fungsi pemerintah desa dengan pemberdayaan masyarakat. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*.

Calista, R., & Rakhmalina, D. (2020). Tugas pokok sebagai fungsi organisasi terhadap kinerja pegawai. *Jurnal Administrasi Publik*.

Fadillah, M., & Riyanto, Y. (2020). Analisis efektivitas kelompok dalam Sekolah Peternakan Rakyat. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*

Isbianti, S., Arbaatun, N., & Suryati, T. (2021). Pendampingan digitalisasi arsip melalui metode In–On–In. *Jurnal Abdimas*.

Lestari, A., & Ridwan, A. (2014). Peran pemerintah daerah Provinsi Riau dalam

Nusantara Hasana Journal
Volume 4 No. 11 (April 2025), Page: 54-60
E-ISSN : 2798-1428

pengelolaan pendidikan. *Jurnal Ilmu Sosial*.

Ningsi, R., Kurnila, R., & Mubin, M. (2022). Pendampingan sekolah melalui pelatihan perencanaan berbasis data. *Jurnal Pendidikan*.

Rahmat, R., Irfandi, I., & Mahmud, M. (2021). Analisis konsepsi manajerial dan kompetensi kepala sekolah. *Jurnal Kepemimpinan Pendidikan*.

Triatna, C. (2015). Membangun komunitas belajar profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan. *Jurnal Manajemen Pendidikan*.

Yulisman, N. (2016). Perancangan sistem informasi akademik sekolah. *Jurnal Teknologi Informasi.*